

Menulis Esai Tingkat SMA

**Bahu Membahu Membangun Spirit Toleransi di
Tengah Pandemi, Bisakah?**

Edenia Hauna Putri

SMA Pribadi Bilingual Boarding School Bandung

Hanya dengan sepintas melihat judulnya, jangan salah mengartikan bahwa saya pesimis terhadap kesempatan menyatukan masyarakat Indonesia yang bersifat plural. Kebiasaan hidup di Negara Indonesia dengan 75.000 lebih pulaunya, 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan enam agama resmi, serta banyak aliran-aliran kepercayaan lainnya seharusnya menumbuhkan sikap toleransi dalam pribadi masyarakatnya masing-masing. Masyarakat Indonesia menunjukkan diversitas dalam segala aspek, salah satunya adalah aspek agama dan kepercayaan. Memang tak bisa dipungkiri, masalah agama adalah hal yang sangat sensitif dan sering dihindari untuk dibicarakan dalam kelompok. Sebagian kelompok memang menghindari topik tersebut karena notabene merupakan masyarakat yang memilih jalan tengah dan tidak memihak tetapi sebagian kelompok sengaja melakukannya hanya karena alasan sederhana, anggapan bahwa agama mereka absolut benarnya jadi tak usah repot-repot membicarakan agama, apalagi agama lain.

Delapan bulan sudah kita dilanda wabah Covid-19. Serta merta hal tersebut tak hanya melahirkan masalah baru di sektor kesehatan namun juga menyebabkan penurunan signifikan pada pendapatan dari sektor-sektor lainnya yang tentu saja semakin menambah daftar panjang krisis yang harus ditangani secepatnya. Di tengah keadaan yang serba menyulitkan ini, masalah komunikasi dan isu intoleransi juga malah memperkeruh suasana. Bukannya saling bantu untuk mengatasi krisis namun masyarakat masih memilih untuk membahas hal sentimental yang kurang perlu.

Walaupun demikian, jangan salah mengira bahwa masyarakat lupa begitu saja untuk bergotong royong, masyarakat Indonesia saat ini masih melaksanakan gotong royong. Salah satu contohnya adalah gerakan gotong royong mengecat spanduk HUT RI yang dianggap memiliki desain berbentuk salib. Hal ini dipelopori oleh beberapa warga yang ramai memadati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe, Aceh. Rekaman aksi pengecatan tersebut sempat *viral* di media sosial. Beberapa pihak ikut bersahutan di media sosial, sebagian mengecam kegiatan tersebut namun tak sedikit pula yang mendukungnya. Apalagi yang lebih penting dari mendebatkan desain grafis spanduk merah putih dibandingkan bersama-sama mengatasi krisis akibat pandemi ini? Jangan salahkan mereka, itu masalah penting.

Dengan menilik hal tersebut sebagai salah satu contoh sikap intoleran yang secara terang-terangan ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, maka akan muncul satu pertanyaan penting, dapatkah kita tetap menjaga gotong royong sebagai identitas bangsa di tengah suasana intoleran?

Pertama-tama, kita akan berusaha memahami terlebih dahulu hubungan antara konsep gotong royong dengan toleransi. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai bagaimana prinsip yang dicetuskan oleh Kementerian Agama bisa berdampak besar terhadap tingkat intoleransi masyarakat Indonesia.

Hasil riset SETARA *Institute* pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Ibu Kota Negara Indonesia sendiri, DKI Jakarta, menempati urutan terakhir sebagai kota dengan tingkat toleransi terendah se-Indonesia. Di samping itu, laporan *Social Progress Index 2017* yang diberikan oleh *Social Progress Imperative* sebagai lembaga *non-profit* Amerika yang bertugas mengukur beberapa indeks asesmen dasar berkaitan dengan performa sosial dan lingkungan tiap negara, menunjukkan bahwa tingkat toleransi di Indonesia berada pada peringkat 117 dari 128 negara. Komponen toleransi itu sendiri dapat dirinci menjadi toleransi terhadap imigran, toleransi terhadap homoseksual, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, toleransi beragama, dan jaringan keamanan masyarakat. Dari keseluruhan aspek tersebut, hal mengejutkan terjadi. Secara ajaib, masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan adat timur justru malah memiliki toleransi lebih tinggi terhadap homoseksual dan bisa ditebak aspek toleransi apa yang mendapatkan nilai terendah. Tentu saja, toleransi beragama. Indonesia hanya berhasil mengantongi nilai sebesar 2,0.

Namun, semua itu hanyalah data yang didapat dari indikator ataupun survei persepsi atas praktik yang terjadi, bukan data komprehensif. Maka dari itu, keyakinan bahwa data ini bersifat fluktuatif juga tidak bisa dipungkiri karena pada dasarnya tingkat emosional tiap individu juga tidak stabil apalagi data tersebut merupakan data dari riset tiga tahun lalu. Akan tetapi, bukan berarti data tersebut tidak valid. Dari data tersebut kita dapat berpikir ulang dan berusaha mengkaji lebih dalam **mengapa gotong royong bisa dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia jika masyarakatnya saja tak menunjukkan adanya tanda-tanda toleransi di mata dunia secara nilai kuantitatifnya?**

Seperti yang dituliskan oleh Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong” (Indonesia dalam Kacamata Soekarno), gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang secara natural tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga pada akhirnya membangun rasa toleransi pada diri tiap individu dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut. Dari situ dapat diartikan bahwa gotong royong dan toleransi memiliki hubungan sebab akibat, dimana toleransi adalah akibat dari adanya suatu sebab yaitu gotong royong.

Dengan gotong royong yang tumbuh secara terus menerus, pada akhirnya rasa toleransi juga akan ikut terbentuk. Dari situlah awal mula munculnya rasa persamaan, mulai tidak membedakan satu sama lain sehingga semua elemen masyarakat bersatu dalam persatuan yang dianggap sama rata oleh semua orang, inilah singkatnya yang disebut dengan toleransi. Dari uraian pendek ini dapat ditarik benang merahnya bahwa **bukan masyarakat toleran yang dibutuhkan untuk melahirkan identitas gotong royong namun sebaliknya, gotong royonglah yang diperlukan untuk melahirkan masyarakat toleran sesama.**

Bagi orang-orang oportunistis, keadaan sekarang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk semakin meningkatkan gotong royong antar sesama yang kemudian tentu saja berdampak terhadap keadaan toleransi mereka, terutama toleransi antar umat beragama. Namun, di sisi lain ada juga golongan orang-orang militan yang sedang dalam keadaan pikiran kacau balau dan lebih memilih untuk abai akan kesempatan-kesempatan menyelamatkan bangsa dari krisis yang sekarang sudah bukan lagi masalah sektor kesehatan dan malah memilih untuk melayani egonya dengan menebar kebencian sana-sini atas dasar ‘kepercayaanku benar, yang lain salah dan harus dihentikan’.

Kasus kekerasan pembubaran upacara midodareni di Solo akibat kurangnya rasa hormat terhadap kepercayaan orang lain menjadi bukti nyata bahwa masih saja ada pelanggaran terhadap hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada masa sekarang yang dampaknya malah mengeskalasi krisis itu sendiri.

Mengawal isu ini, Kementerian Agama tak tinggal diam. Mereka mencetuskan sebuah gagasan yang sebenarnya sudah tidak asing di ranah sosial tetapi sekarang mencoba diterapkan di dalam lingkungan beragama, yaitu prinsip

moderasi beragama. Secara mudahnya, moderasi berarti jalan tengah dimana kita tidak memihak dan tidak berlebih-lebihan dalam bertindak, hal ini juga berarti kita harus bersikap adil terhadap semua pihak yang terlibat. Perlu diingat bahwa yang dimoderasikan disini adalah beragamanya bukan agamanya. Agama pastilah hal yang benar bahkan keputusan untuk beragama pun tidak perlu dimoderasikan, yang perlu adalah bagaimana cara kita beragama.

Moderat dalam ranah keagamaan berarti meyakini bahwa apa yang kita percayai benar tanpa sedikit pun merasa perlu untuk mengkafirkan penganut agama lain. Dasar dari menjadi masyarakat yang moderat dalam beragama adalah tidak berlebih-lebihan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari situ muncullah orang-orang yang tidak melupakan kegunaan nalar dalam memahami teks-teks keagamaan sehingga dapat menginterpretasikannya secara kontekstual dan tidak kaku dalam aktualisasinya. Dengan itu, masyarakat bisa saling kolaborasi sehingga gotong royong baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjalin dan tak ayal akan melahirkan rasa toleransi antar penganut agama. Bayangkan betapa damainya kehidupan beragama yang terintegrasi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Namun, tak semua individu dilahirkan dengan kapasitas nalar yang sama untuk memahami sesuatu. Sebab, setiap orang diciptakan Tuhan dengan berbagai karakter dan kemampuan bernalar yang berbeda. Kelompok orang yang lahir dengan kemampuan nalar di bawah rata-rata akan lebih sering mengalami kesulitan dalam melakukan interpretasi kitab suci seorang diri dan dikhawatirkan malah menghasilkan sebuah kesimpulan yang jauh menyeleweng dari maksud perintah keagamaannya itu sendiri.

Maka dari itu, daripada membuang lebih banyak lagi sumber daya yang memang sudah banyak terkuras untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini, pilihan untuk mengubah pola pikir sebagian masyarakat yang kurang beruntung ini sebaiknya dilupakan saja karena itu hanya akan buang-buang waktu, mereka tidak akan berubah. Bukan berarti kita berserah diri dan membiarkan saja mereka melakukan apa yang mereka suka dengan syarat kita tidak terlibat, itu apatis namanya dan itu sama sekali bukan cerminan dari gotong royong. Untuk menghadapi kelompok masyarakat tersebut, peran dari pemuka agama lah yang

dibutuhkan terutama di kondisi pandemi ini. Pemuka agama memiliki kharisma tersendiri di lingkungan masyarakatnya sehingga cenderung lebih dipercaya oleh banyak orang. Menurut Max Weber, konsep otoritas seperti ini disebut sebagai *Charismatic Authority* yang sifatnya irasional.

Sebagai golongan intelektual yang paham agama dan memiliki keuntungan otoritas atas masyarakat luas seharusnya para agamawan dapat memanfaatkan isu dalam pandemi ini sebagai batu loncatan untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan gotong royong yang melahirkan toleransi dan mengesampingkan hal-hal sentimental yang tidak penting. Penting juga bagi mereka untuk tak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa walaupun prosedur pengerjaan sebuah ritual keagamaan berubah tidak berarti nilainya di hadapan Sang Pencipta otomatis berubah. Hal ini dapat memberikan ketenangan pada masyarakat sehingga mereka tidak akan mencari pembenaran-pembenaran sendiri yang terkadang malah membuat mereka sendiri linglung dan berakhir lagi-lagi dengan prinsip ‘kepercayaanmu benar, yang lain salah dan harus dihentikan’.

Kegiatan-kegiatan yang dilandasi akan nilai keagamaan, seperti tidak mengharap pamrih, yang diorganisir oleh agamawan itu sendiri dapat menjadi ladang bagi masyarakat umum untuk saling bahu membahu mengatasi masalah dan untuk sejenak melupakan batas beda antara mereka. Harapannya adalah hal itu tidak terjadi untuk sejenak saja, namun bertahan lama hingga ke generasi-generasi sesudahnya.

Kesimpulan yang didapat adalah Indonesia sebagai negara yang secara angka masih tergolong sebagai negara dengan tingkat toleransi antar umat beragama yang sangat rendah sedang dilanda krisis intoleransi. Anggapan bahwa sebelum bergotong royong seseorang harus mampu untuk bertoleransi sebenarnya adalah anggapan yang tidak benar karena pada dasarnya, toleransi muncul akibat gotong royong yang dibiasakan. Maka kunci utama untuk membentuk negara Indonesia yang toleran antar umat beragama adalah dengan menguatkan pondasi gotong royong. Hal tersebut dapat diwujudkan mulai dari diri sendiri yaitu dengan menjadikan diri sebagai umat yang moderat. Selain itu, peran pemuka agama juga sangat diperlukan untuk menggerakkan roda gotong royong antar umat beragama terutama di kondisi pandemi Covid-19.